



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KKP
2026
GROW STRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) BBP3KP triwulan I tahun 2026 ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan LKj ini adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja BBP3KP kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. Selain itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

Landasan penyusunan LKj BBP3KP triwulan I tahun 2026 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan kinerja ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BBP3KP serta mendukung salah satu sasaran program Ditjen PDSPKP yaitu Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Kegiatan utama BBP3KP yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP pada triwulan I tahun 2026 yaitu (a) Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (%) dengan capaian sebesar 88,57%, atau setara dengan 118,09% terhadap target tahun 2026 yakni 75%, dan (b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (%) dengan capaian 100%, atau setara dengan 105,26% terhadap target tahun 2026 yakni 100%.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan Setjen KKP dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP yang telah membimbing penyusunan LKj serta kepada tim pelaksana kegiatan dan segenap keluarga besar BBP3KP yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan di lingkungan BBP3KP dengan penuh tanggung jawab.

Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan BBP3KP di waktu yang akan datang. Saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Jakarta, 21 April 2026
Kepala BBP3KP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc



TIM PENYUSUN



PENGARAH

Kepala BBP3KP

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan BBP3KP

KONTRIBUTOR

Tim penguatan akuntabilitas kinerja lingkup BBP3KP,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. PERMASALAHAN UTAMA	4
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. RENCANA STRATEGIS	7
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. CAPAIAN KINERJA	12
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	13
IK 1. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	14
IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (Persen)	28
IK 3. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP (Persen)	30
IK 4. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	32
IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBP3KP (Nilai)	35
IK 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	39
IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	42
IK 8. Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)	44
IK 9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP (Nilai)	47
IK 10. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	50
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	52

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2026.....	52
BAB IV PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2026.....	10
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 3. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	15
Tabel 4. Pencapaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP.....	28
Tabel 5. Pencapaian Indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP.....	30
Tabel 6. Pencapaian indikator nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP	33
Tabel 7. Pencapaian indikator nilai penilaian mandiri SAKIP BBP3KP	36
Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP	41
Tabel 9. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP	43
Tabel 10. Pencapaian indikator indeks profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks).....	45
Tabel 11. Pencapaian indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP.....	48
Tabel 12. Pencapaian indikator inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP	51
Tabel 13. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan	52
Tabel 14. Permasalahan dan rekomendasi periode triwulan I tahun 2026	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP.....	3
Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Maret Tahun 2026	4
Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK triwulan I tahun 2026	12
Gambar 4. Pengujian rutin di Laboratorium BBP3KP	16
Gambar 5. Pelatihan pengoperasian alat GCMS sesuai metode pengujian etanol pada makanan	17
Gambar 6. Pembuatan Bahan Acuan	17
Gambar 7. Pemeliharaan Sistem Manajemen Produsen Bahan Acuan sesuai SNI ISO 17034	18
Gambar 8. Pelaksanaan Kaji Ulang Permohonan dan Evaluasi Awal	18
Gambar 9. Pelaksanaan Surveilans.....	19
Gambar 10. Tinjauan Hasil dan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan/atau SPPT SNI.....	19
Gambar 11. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Sertifikasi Halal	20
Gambar 12. Sosialisasi dan Pendampingan Proses Sertifikasi Halal	20
Gambar 13. Pelaksanaan audit visitasi terhadap pelaku usaha.....	20
Gambar 14. Pelaksanaan verifikasi dan kalibrasi peralatan laboratorium	21
Gambar 15. Pelatihan kalibrasi suhu dan kelembapan	21
Gambar 16. Uji Banding dan Audit Internal Kegiatan persiapan akreditasi laboratorium kalibrasi.....	21
Gambar 17. Kegiatan perluasan ruang lingkup LSPPro-HP BBP3KP	22
Gambar 18. Asesmen reakreditasi dan perluasan ruang lingkup oleh KAN	22
Gambar 19. Rapat internal dan penguatan perencanaan kegiatan LSPPro-HP	23
Gambar 20. Pendampingan UMKM Kelautan dan Perikanan	23
Gambar 21. Pelaksanaan Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk	24
Gambar 22. Koordinasi dan Penguatan Sinergi Stakeholder	24
Gambar 23. Perencanaan dan Koordinasi Program Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran.....	25
Gambar 24. Verifikasi calon peserta fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran produk KP	26
Gambar 25. Penyusunan Bahan Informasi dan Peliputan Kegiatan	27
Gambar 26. Penyebarluasan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan	27
Gambar 27. Tangkapan layar aplikasi SIDAK KKP triwulan I tahun 2026	29

Gambar 28. Dokumentasi Pra rekonsiliasi Laporan keuangan dan Laporan Barang milik negara (BMN) satker Lingkup ditjen PDSPKP	30
Gambar 29. Rekonsiliasi Laporan keuangan dan Laporan Barang milik negara (BMN) satker Lingkup ditjen PDSPKP	31
Gambar 30. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker lingkup Ditjen PDSPKP	31
Gambar 31. Rapat perihal Mobil Berpendingin	31
Gambar 32. Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2025 dan monitoring progres pengadaan barang/ jasa tahun 2026	31
Gambar 33. Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP bulan Januari	33
Gambar 34. Dokumentasi apel pagi dan morning Briefing Reformasi Birokrasi lingkup Dirjen PDSPKP	34
Gambar 35. Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP	34
Gambar 36. Kegiatan apel pagi dan morning briefing WBK/WBBM lingkup BBP3KP	34
Gambar 37. Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP	34
Gambar 38. Apel pagi dan morning briefing WBK/WBBM lingkup BBP3KP bulan Maret	35
Gambar 39. Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)	36
Gambar 40. Finalisasi pelaporan kegiatan yang mendukung Kebijakan Ekonomi Biru lingkup PDSPKP TA 2025	37
Gambar 41. Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 Periode Triwulan IV tahun 2025	37
Gambar 42. Pengisian informasi perencanaan kinerja pasca penetapan SOTK baru lingkup Ditjen PDSPKP pada SAPK	38
Gambar 43. <i>Entry meeting</i> reviu LKj level 1 periode triwulan IV tahun 2025	38
Gambar 44. Temu teknis BBP3KP tahun 2026	38
Gambar 45. Rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja	39
Gambar 46. Reformulasi IKPA 2026	40
Gambar 47. Pembahasan terkait kegiatan anggaran pemberdayaan masyarakat (aspirasi)	43
Gambar 48. Pembahasan Tagging Anggaran Ditjen PDSPKP dalam Mendukung Kebijakan Blue Economy	44
Gambar 49. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP	45
Gambar 50. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pegawai Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	46
Gambar 51. Dokumentasi Talkshow Budaya Kerja ASN KKP Dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang semakin cepat	46
Gambar 52. Pemetaan Konversi Jabatan Non ASN ke Jabatan Pelaksana dan Penyusunan ABK Jabatan Pelaksana	46

Gambar 53. Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Non Bidang Kelautan dan Perikanan.....	46
Gambar 54. Kegiatan Pelatihan Microsoft Word lingkup BBP3KP.....	47
Gambar 55. Dokumentasi Sosialisasi Akun Portal	48
Gambar 56. Dokumentasi sosialisasi Aplikasi Super Apps KKP	48
Gambar 57. Dokumentasi Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.....	49
Gambar 58. Dokumentasi Pembahasan Pemindahan Arsip Inaktif dalam rangka tertib arsip dan efisiensi yang diselenggarakan oleh E-Guru	49
Gambar 59. Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan	49
Gambar 60. Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN	49
Gambar 61. Penerapan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) lingkup KKP dan penilaian arsip usul musnah	50
Gambar 62. Rapat pembahasan proposal KIPP.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan PK Level 2 BBP3KP Tahun 2026	55
Lampiran 2. Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian	56
Lampiran 3. Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)	63
Lampiran 4. Data Penambahan Ruang Lingkup Layanan Tahun 2026	64
Lampiran 5. Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.....	65

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) triwulan I tahun 2026 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) BBP3KP selama triwulan I tahun 2026, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) triwulan I tahun 2026 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP dan Rencana Strategis BBP3KP Tahun 2025-2029.

Capaian indikator kinerja BBP3KP pada triwulan I tahun 2026 telah tercapai keseluruhan, yaitu 2 indikator dari 10 indikator yang ditetapkan. Terdapat satu indikator berpredikat istimewa yaitu persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian dengan capaian 88,57% dan satu indikator berpredikat baik yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBP3KP dengan capaian 100%. Secara rata-rata capaian realisasi indikator kinerja BBP3KP berpredikat Istimewa dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang ditunjukkan dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id adalah 111,68%.

Perjanjian kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP yang telah ditetapkan untuk dicapai tahun 2026 terdiri atas 2 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja BBP3KP tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dari 10 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung per triwulan yaitu: (1) Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian, dan (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP.
2. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung secara semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP, dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP.
3. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang pencapaiannya baru dapat dihitung pada akhir tahun, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian temuan BPK BBP3KP, (2) Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP, (3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBP3KP, (4) Nilai Kinerja



Perencanaan Anggaran BBP3KP, dan (5) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP.

Tahun 2026 pagu anggaran BBP3KP adalah sebesar Rp32.409.892.000,00, dengan adanya revisi pegeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 menjadi Rp27.485.955.000,00. Realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2026 sebesar Rp4.937.661.364,00 atau setara dengan 17,96%.

Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada *outcome*. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas disini diartikan sebagai perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tahapan penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Penyusunan Rencana Strategis, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pengelolaan Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja dan (6) Review dan Evaluasi Kinerja.

Pelaporan Kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang

dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyusun Laporan Kinerja BBP3KP triwulan I tahun 2026. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan I tahun 2026.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP periode triwulan I tahun 2026 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas kinerja yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan selama periode triwulan I tahun 2026.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaan BBP3KP didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

BBP3KP memiliki tugas pokok melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

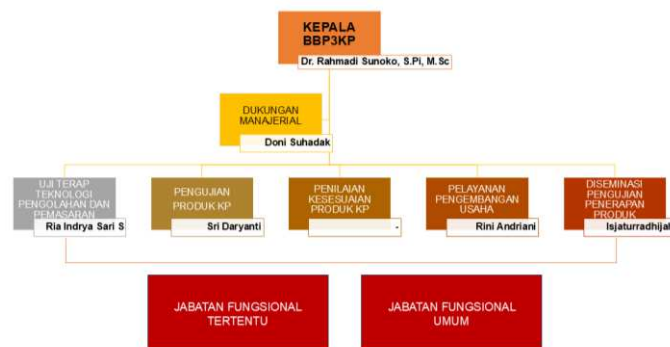
- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b) Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- c) Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e) Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia hasil perikanan;
- f) Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan;
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BBP3KP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Subbag Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi BBP3KP diatur seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP

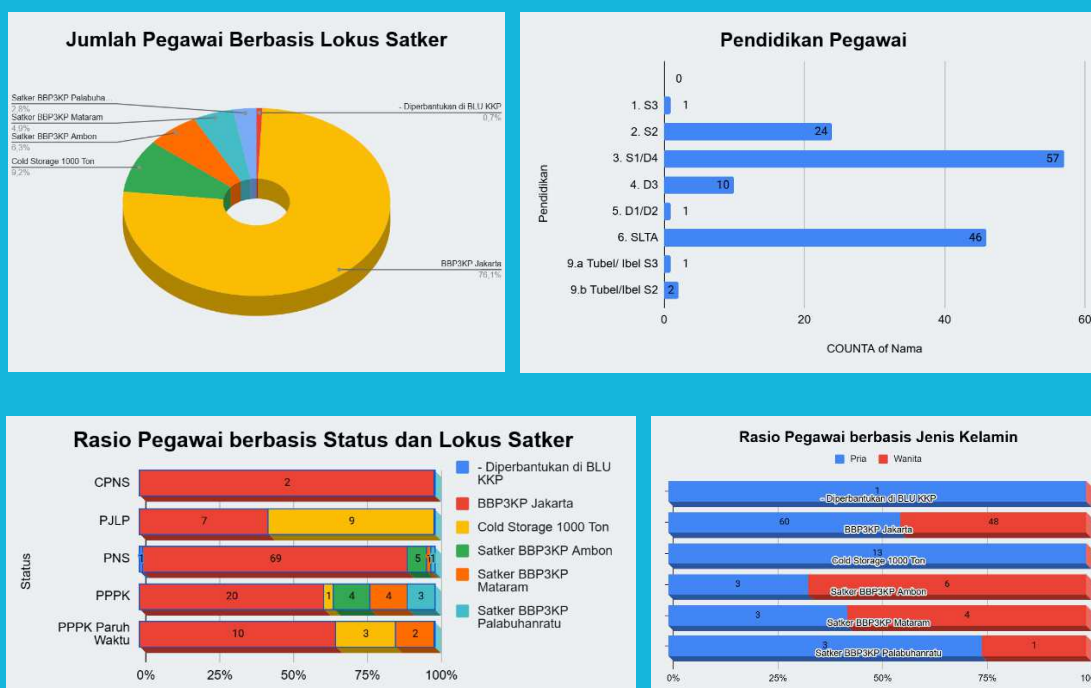
BBP3KP dibentuk 3 satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, yang berlokasi di Palabuhanratu, Mataram, dan Ambon. Ketiga satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pelayanan pengembangan usaha produk kelautan dan perikanan, yang dipimpin oleh pengelola satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

1.4. KERAGAAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada triwulan I tahun 2026, jumlah pegawai BBP3KP per akhir Maret tahun 2026 adalah sebanyak 142 orang, dapat dilihat pada Gambar 2.

KEPEGAWAIAN

142 PEGAWAI



Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Maret Tahun 2026

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Ke depan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi

perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar.

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Listeria*, dan *Vibrio* dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

Sehubungan dengan berbagai isu strategis tersebut, BBP3KP menetapkan sasaran dan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PDSPKP dan Kepala BBP3KP.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP periode triwulan I tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja BBP3KP selama periode triwulan I tahun 2026. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) periode triwulan I tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan merumuskan tujuan pembangunan selama lima tahun: Meningkatnya produk KP yang memenuhi standar pengujian. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan persentase produk yang memenuhi persyaratan standar pengujian, dari 70% pada tahun 2025 menjadi 90% pada tahun 2029.

2.1.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BBP3KP sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan kegiatan dalam program nilai tambah dan daya saing industri serta program dukungan manajemen di Ditjen PDSPKP. Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Sasaran: Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Kelautan dan Perikanan yang Disediakan meningkat dari 7 produk pada tahun 2025 menjadi 11 produk pada tahun 2029.
 - b. Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya meningkat dari 162 produk pada tahun 2025 menjadi 380 produk pada tahun 2029.
 - c. Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji meningkat dari 250 produk pada tahun 2025 menjadi 1.300 produk pada tahun 2029.
 - d. Sasaran: Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Masyarakat yang Menerima Diseminasi

dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan meningkat dari 1.000 orang pada tahun 2025 menjadi 3.000 orang pada tahun 2029.

- e. Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan meningkat dari 12 produk pada tahun 2025 menjadi 35 produk pada tahun 2029.
- f. Sasaran: UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah pelaku usaha yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis meningkat dari 9 UMKM pada tahun 2025 menjadi 112 UMKM pada tahun 2029.
- g. Sasaran: Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku meningkat dari 15 Badan Usaha pada tahun 2025 menjadi 40 Badan Usaha pada tahun 2029.
- h. Sasaran: Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku meningkat dari 200 unit pada tahun 2025 menjadi 600 unit pada tahun 2029.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 92 pada tahun 2025 menjadi 92,2 pada tahun 2029;
- b. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 87 pada tahun 2025 menjadi 89 pada tahun 2029;
- c. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 86 pada tahun 2025 menjadi 86,8 pada tahun 2029;
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 85 pada tahun 2025 menjadi 89 pada tahun 2029;
- e. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari <0,5% pada tahun 2025 menjadi <0,5% pada tahun 2029; dan

- f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 81,5 pada tahun 2025 menjadi 82,5 pada tahun 2029.

2.1.2 Kebijakan

Arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan “Kebijakan PDSPKP: Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”. Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta juga sesuai dengan visi KKP 2025-2029.

Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
 - Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan
- b. Program Dukungan Manajemen. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:
 - Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian

untuk masing-masing indikator. Sejak tahun 2013, perjanjian kinerja pada unit kerja lingkup BBP3KP telah didasarkan pada konsep manajemen kinerja berbasis BSC.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kegiatan yang diharapkan dicapai oleh BBP3KP pada tahun 2026 seperti tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja BBP3KP pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian	1 Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	75
KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (Persen)	95
		3 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP (Persen)	100
		4 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75
		5 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	86,2
		6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	92,1
		7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	71,75
		8 Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)	81,5
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP (Nilai)	81
		10 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	1

BBP3KP mempunyai output kegiatan sesuai dokumen Rencana Kerja TA 2025 pada aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas sebagai berikut:

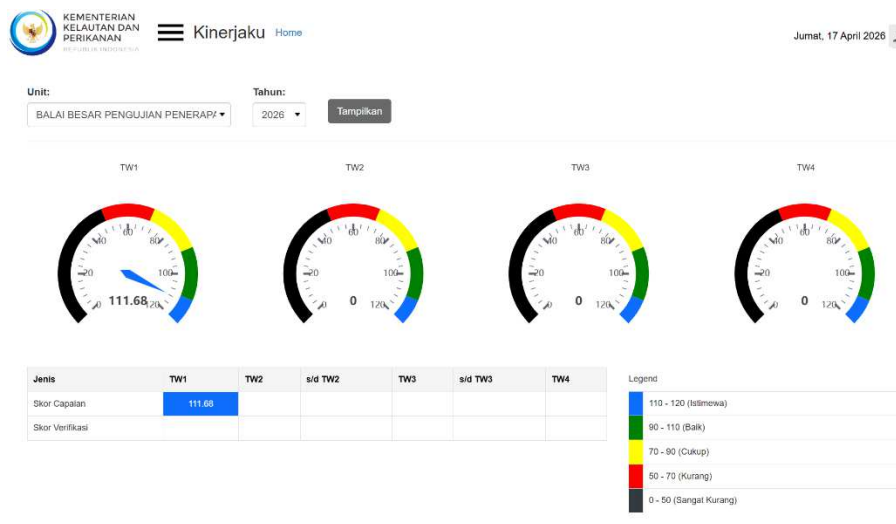
- 1) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan, sebanyak 7 produk;
- 2) Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya, sebanyak 162 produk;
- 3) Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji, sebanyak 250 produk;
- 4) Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, sebanyak 1.000 orang;
- 5) Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan, sebanyak 12 produk;
- 6) UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis, sebanyak 9 UMKM;
- 7) Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk, sebanyak 15 badan usaha;
- 8) Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku, sebanyak 200 unit;
- 9) Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku, sebanyak 1 unit;
- 10) Layanan Umum, sebanyak 1 unit;
- 11) Layanan Perkantoran, sebanyak 1 unit;
- 12) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, sebanyak 1 layanan;
- 13) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, sebanyak 1 layanan; dan
- 14) Layanan Manajemen Keuangan, sebanyak 1 layanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja triwulan I tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan BBP3KP dari bulan Januari sampai dengan Maret 2026. BBP3KP telah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Nilai rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBP3KP sebesar 111,68% dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK triwulan I tahun 2026

Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP. Capaian masing-masing Indikator Kinerja pembentuk NPSS diuraikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2026	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2026	TW I 2026		Tahun 2026	TW I 2026
1	Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	75	75	82,67	110,23	110,23

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2026	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2026	TW I 2026		Tahun 2026	TW I 2026
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (Persen)	95	95	100	105,26	105,26
3	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP (Persen)	100	-	-	-	-
4	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75	-	-	-	-
5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBP3KP (Nilai)	86,2	-	-	-	-
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	92,1	-	-	-	-
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	71,75	-	-	-	-
8	Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)	81,5	-	-	-	-
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP (Nilai)	81	-	-	-	-
10	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	1	-	-	-	-

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja BBP3KP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.2.1

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Meningkatkan Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja.

IK 1. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)

Produk perikanan secara umum perlu diuji nutrisi dan mutunya karena produk tersebut telah mengalami proses pengolahan dan pencampuran dengan bahan-bahan non ikan, seperti tepung dan bumbu-bumbu yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dari sudut pandang konsumen, ketersediaan data nutrisi dan mutu memberi kesempatan bagi mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dari sudut pandang produsen, ketersediaan data nutrisi dan mutu produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari produk tersebut.

Uji nutrisi dan mutu produk hasil perikanan telah dilaksanakan oleh BBP3KP sejak tahun 2010. Kegiatan ini meliputi pengujian contoh produk klien LS Pro-HP untuk proses sertifikasi, contoh produk perikanan sebagai data dukung penyusunan RSNI, contoh produk dari tenant binaan inkubasi bisnis, tenant binaan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, contoh produk eksternal dan contoh produk dari UPI/pasar/pelabuhan yang disampling oleh personil laboratorium yang ditugaskan. Selain itu, BBP3KP juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan Teknis Laboratorium Pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025.

Ketersediaan data uji diharapkan dapat membantu pelaku usaha pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Selain itu, hasil pengujian nutrisi dan mutu juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan Ditjen PDSPKP, misalnya dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil) melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi.

Persentase produk yang memenuhi persyaratan standar pengujian merupakan persentase dari produk kelautan dan perikanan yang diuji di Laboratorium BBP3KP yang memenuhi standar pengujian dibandingkan dengan keseluruhan produk KP yang diuji pada tahun berjalan di Laboratorium BBP3KP.

Produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian adalah produk kelautan dan perikanan yang telah memiliki hasil uji yang memenuhi persyaratan standar (SNI, Perka BPOM, atau standar lainnya).

Produk yang diuji merupakan produk kelautan dan perikanan yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan pendampingan BBP3KP (tenant inbis dan uji terap), penyusunan bahan RSNI, sertifikasi produk, kurasi dalam rangka menuju UMKM naik kelas dan produk KP yang berasal dari sumber lainnya.

$$\%PPSP = \frac{\sum_{i=1}^4 A_i}{\sum_{i=1}^4 B_i} \times 100\%$$

%PPSP adalah Persentase Produk yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian. $\sum_{i=1}^4 A_i$ adalah jumlah produk yang diuji dan memenuhi standar per triwulan. $\sum_{i=1}^4 B_i$ adalah jumlah keseluruhan produk yang diuji per triwulan. Pada periode triwulan I tahun 2026, produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian sejumlah 62 produk dari 70 produk kelautan dan perikanan yang diuji.

Tabel 3. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	75	70	70	75	82,67	83,84	88,3	82,67	110,23	110,23	-1,42	-6,38

Pada triwulan I tahun 2026, capaian persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian adalah 82,67%. Capaian ini setara dengan 110,23% terhadap target triwulan I tahun 2026 yakni 75%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 75%, maka capaian triwulan I tahun 2026 telah mencapai 110,23%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yaitu 83,84% maka capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,42%, begitu pula jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada periode sebelumnya yaitu 70% maka capaian ini juga mengalami penurunan sebesar -6,38%.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1) Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan

Laboratorium BBP3KP telah melaksanakan berbagai kegiatan pengujian nutrisi dan keamanan produk perikanan serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 secara konsisten. Kegiatan pengujian meliputi uji kimia, fisika, sensori, cemaran logam, dan cemaran mikrobiologi terhadap 70 sampel produk kelautan dan perikanan dengan total 163 data uji. Produk yang diuji terdiri dari klien laboratorium yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar produk, yaitu 62 produk, memenuhi persyaratan mutu sesuai standar, sementara 8 produk tidak memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan.

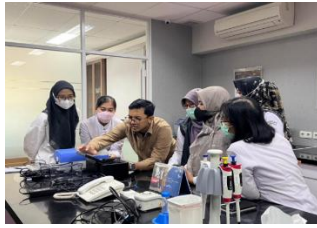


Gambar 4. Pengujian rutin di Laboratorium BBP3KP

2) Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan Teknis Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025

Kegiatan ini pada triwulan I tahun 2026 difokuskan pada tiga kegiatan utama sebagai berikut:

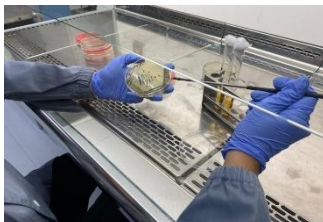
- a. Penguatan sistem manajemen mutu dan integrasi laboratorium dilakukan melalui rapat perencanaan kegiatan tahun 2026, kaji ulang dokumen integrasi laboratorium pengujian dan kalibrasi, serta pelaksanaan Temu Teknis BBP3KP Tahun 2026 untuk penyelarasan program kerja dan penguatan sistem manajemen mutu.
- b. Peningkatan kompetensi personel dan pengembangan layanan pengujian dilaksanakan melalui pelatihan pengoperasian GC–MS, keikutsertaan pada presentasi set uji halal berbasis PCR, serta pembentukan dan evaluasi asesor sensori produk keripik ikan dan ikan beku.
- c. Persiapan penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium dilakukan melalui koordinasi uji profisiensi matriks garam, penyusunan laporan verifikasi metode dan ketidakpastian pengukuran, koordinasi pelatihan pengujian logam berat pada garam, serta pengisian formulir KAN sebagai evaluasi kesiapan penambahan ruang lingkup akreditasi.



Gambar 5. Pelatihan pengoperasian alat GCMS sesuai metode pengujian etanol pada makanan

3) Pembuatan Bahan Acuan dalam rangka Jaminan Mutu Hasil Pengujian Laboratorium

Laboratorium BBP3KP melaksanakan kegiatan pembuatan bahan acuan mikrobiologi dalam rangka mendukung jaminan mutu hasil pengujian sesuai SNI ISO 17034:2024. Kegiatan diawali pada bulan Januari dengan identifikasi bakteri *Staphylococcus aureus* dari sampel uji yang menunjukkan hasil positif uji koagulase (+4), kemudian bakteri dipelihara pada media BHI sebagai persiapan pembuatan bahan acuan. Selanjutnya pada bulan Februari dilakukan produksi bahan acuan mikrobiologi batch 1 sebanyak 63 vial dan dilanjutkan dengan uji homogenitas terhadap 10 vial yang menunjukkan hasil positif *Staphylococcus aureus* dengan kondisi vakum baik, serta direncanakan untuk uji karakterisasi menggunakan metode sequencing. Pada bulan Maret dilakukan identifikasi bakteri *Escherichia coli* sebagai upaya penambahan ruang lingkup produksi bahan acuan, dimana hasil uji biokimia menunjukkan karakteristik sesuai *E. coli* dan direncanakan dilanjutkan dengan uji penegasan pada periode berikutnya.



Gambar 6. Pembuatan Bahan Acuan

4) Pemeliharaan Sistem Manajemen Produsen Bahan Acuan sesuai SNI ISO 17034

Pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan pemeliharaan sistem manajemen dan persyaratan teknis Produsen Bahan Acuan (PBA) SNI ISO/IEC 17034 diawali dengan rapat perencanaan kegiatan tahun 2026 pada Januari yang membahas sosialisasi dan promosi layanan PBA, rencana studi banding, serta penambahan ruang lingkup bahan acuan untuk *Escherichia coli* dan *Salmonella*. Selain itu, dilakukan identifikasi rencana integrasi dokumen sistem manajemen ISO/IEC 17034 dengan ISO/IEC 17043 dalam rangka pembentukan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) BBP3KP. Pada bulan Februari, melalui Temu Teknis BBP3KP Tahun 2026, ditetapkan penguatan peran PBA

melalui penambahan ruang lingkup isolat *Salmonella* dan *E. coli* serta pengembangan laboratorium biomolekuler, yang ditindaklanjuti dengan identifikasi kebutuhan pelatihan teknis biomolekuler. Selanjutnya pada bulan Maret dilakukan persiapan kaji ulang dokumen melalui identifikasi dokumen dan status revisi, pengumpulan bahan masukan dari hasil audit dan umpan balik, serta perencanaan pelaksanaan kaji ulang untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan terbaru.



Gambar 7. Pemeliharaan Sistem Manajemen Produsen Bahan Acuan sesuai SNI ISO 17034

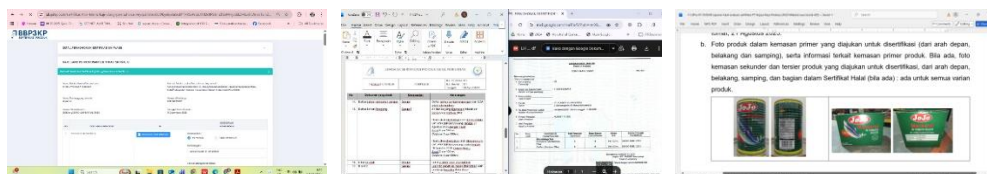
5) Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan

Capaian penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui kegiatan layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan, layanan lembaga pemeriksa halal, dan layanan laboratorium kalibrasi. Capaian tersebut pada triwulan I yaitu 24 produk atau setara 24% dari target 100 produk, dengan rincian 9 produk dari kegiatan Layanan Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan dan 15 produk dari kegiatan layanan lembaga pemeriksa halal.

I. Layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan

a. Pelaksanaan Kaji Ulang Permohonan dan Evaluasi Awal

Kegiatan kaji ulang permohonan dilaksanakan pada Januari–Maret 2026 terhadap beberapa pelaku usaha antara lain PT Srijaya Raya Perkasa, PT Sumberyala Samudra, PT Carvinna Trijaya Makmur, PT Artha Sumatera Abadi, dan PT Bandeng Juwana untuk produk sarden, makrel, tuna, dan produk olahan ikan lainnya sesuai Permen KP Nomor 32 Tahun 2023 dan PBSN Nomor 5 Tahun 2024. Selain itu, evaluasi awal terhadap PT Srijaya Raya Perkasa dilaksanakan pada 23–27 Februari 2026 untuk produk makrel dalam saus tomat merek JOJO guna menilai kesesuaian produk dengan SNI 8222:2022.



Gambar 8. Pelaksanaan Kaji Ulang Permohonan dan Evaluasi Awal

b. **Persiapan Surveilans dan Pelaksanaan Surveilans**

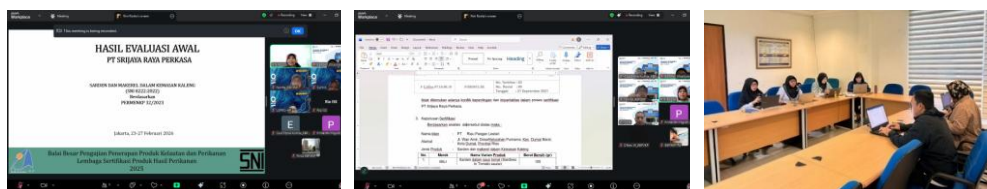
Kegiatan surveilans terhadap Poklhasr Dinari tanggal 4–5 Februari 2026, PT Sinar Pure Foods International tanggal 23–25 Februari 2026, CV Karya Produksi Kamto tanggal 25 Februari 2026, dan UKM Olahan Tuna Bu Hirto tanggal 26 Februari 2026 untuk memastikan konsistensi penerapan SNI. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi persiapan surveilans PT Interfood Sukses Jasindo dan PT Indo Warna Perkasa tanggal 3 Maret 2026 dalam rangka surveilans unit produksi di Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok yang direncanakan pada April 2026.



Gambar 9. Pelaksanaan Surveilans

c. **Tinjauan Hasil dan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan/atau SPPT SNI**

Kegiatan tinjauan hasil sertifikasi dilaksanakan tanggal 2 Maret 2026 terhadap PT Srijaya Raya Perkasa dengan hasil merekomendasikan penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI untuk produk makarel merek JOJO. Selain itu, dilakukan rapat tindak lanjut sertifikasi pada Februari 2026 serta rapat koordinasi lintas unit kerja terkait peninjauan SNI 8222:2022 tanggal 13 Februari 2026.



Gambar 10. Tinjauan Hasil dan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan/atau SPPT SNI

II. **Layanan Lembaga Pemeriksa Halal**

a. **Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Sertifikasi Halal**

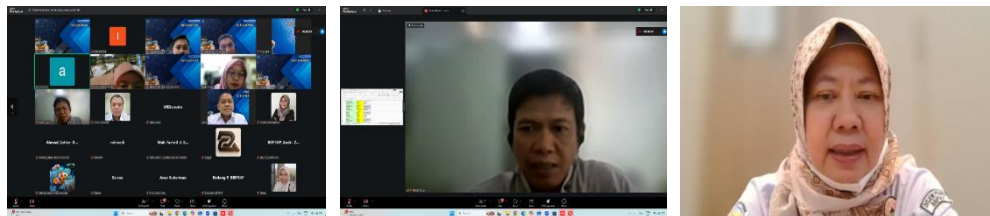
Kegiatan ini meliputi penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJPH dan KKP pada 7 Januari 2026, rapat pembahasan kewajiban sertifikasi halal pada 20 dan 27 Januari 2026, serta sosialisasi SOP layanan LPH BBP3KP pada 5 Maret 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran LPH BBP3KP dalam percepatan sertifikasi halal produk kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesiapan internal dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.



Gambar 11. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Sertifikasi Halal

b. Sosialisasi dan Pendampingan Proses Sertifikasi Halal

Kegiatan ini meliputi rapat pendampingan implementasi akun Pendamping Proses Produk Halal pada SIHALAL pada 5 Februari 2026 dan sosialisasi LPH BBP3KP kepada penyuluh perikanan Jabodetabek pada 10 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 12. Sosialisasi dan Pendampingan Proses Sertifikasi Halal

c. Pelaksanaan Audit Visitasi dan Sidang Fatwa Produk Halal

Kegiatan audit visitasi dilakukan pada UMKM Papa Opanz (23 Januari 2026), UMKM Otslan Griya (11 Februari 2026), dan UMKM Camar Laut (10 Maret 2026). Selanjutnya dilaksanakan sidang fatwa penetapan kehalalan produk UMKM Dwi Sari Widiastuti dan UMKM Syukri pada 17 Maret 2026 sebagai bagian dari proses sertifikasi halal.



Gambar 13. Pelaksanaan audit visitasi terhadap pelaku usaha

III. Layanan Laboratorium Kalibrasi

a. Pelaksanaan verifikasi dan kalibrasi peralatan laboratorium

Dilaksanakan berbagai kegiatan verifikasi dan kalibrasi peralatan laboratorium untuk memastikan akurasi dan keandalan alat ukur. Kegiatan meliputi verifikasi kalibrasi *enclosure* suhu, *climatic chamber*, *oven*, *refrigerator*, *waterbath*, timbangan elektronik, serta anak timbangan yang dilaksanakan pada 29 Desember 2025–2 Januari 2026, 15 Januari, 21 Januari, 28 Januari, 3 & 5 Februari, 10 Februari, 25 Februari, serta sepanjang Maret 2026.

Kegiatan ini bertujuan mendukung kesiapan laboratorium kalibrasi dalam memenuhi persyaratan teknis serta meningkatkan kualitas hasil pengukuran.



Gambar 14. Pelaksanaan verifikasi dan kalibrasi peralatan laboratorium

- b. Penguatan Kompetensi SDM dan Sistem Manajemen Laboratorium Kalibrasi
- Penguatan dilakukan melalui pelatihan kalibrasi suhu dan kelembapan tanggal 14 Januari 2026, rapat integrasi dokumen laboratorium kalibrasi tanggal 23 Januari 2026, serta sosialisasi dokumen laboratorium kalibrasi berbasis SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personel, menyempurnakan dokumen mutu, serta memastikan penerapan sistem manajemen laboratorium kalibrasi secara efektif.



Gambar 15. Pelatihan kalibrasi suhu dan kelembapan

- c. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi melalui Uji Banding dan Audit Internal
- Kegiatan persiapan akreditasi dilakukan melalui paparan rencana kegiatan dan uji banding kalibrasi tanggal 23 Januari 2026, pelaksanaan uji banding laboratorium kalibrasi tanggal 25 Februari 2026 bersama laboratorium eksternal, serta audit internal laboratorium kalibrasi pada Maret 2026. Audit internal menghasilkan 24 temuan ketidaksesuaian (1 mayor dan 23 minor) yang menjadi dasar perbaikan dalam rangka persiapan proses akreditasi laboratorium kalibrasi BBP3KP.



Gambar 16. Uji Banding dan Audit Internal Kegiatan persiapan akreditasi laboratorium kalibrasi

- 6) Layanan Ruang Lingkup SNI Produk Kelautan dan Perikanan
- a. Perluasan ruang lingkup Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan

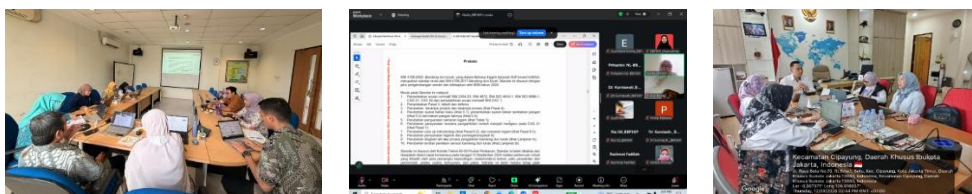
Kegiatan perluasan ruang lingkup LSPPro-HP BBP3KP dilaksanakan melalui penyelesaian audit kecukupan dokumen, rapat koordinasi pembahasan perluasan ruang lingkup tanggal 20 Januari 2026, penyiapan contoh ikan beku untuk seleksi asesor sensori, serta koordinasi dan identifikasi calon klien di CV Vatra Mandiri Depok tanggal 20 Februari 2026 untuk produk fillet ikan beku. Selanjutnya dilakukan persiapan asesmen perluasan ruang lingkup oleh KAN dan pelaksanaan asesmen ulang serta perluasan ruang lingkup tanggal 12–13 Maret 2026, dengan pengajuan penambahan 15 ruang lingkup produk sehingga total ruang lingkup LSPPro-HP BBP3KP menjadi 37 ruang lingkup.



Gambar 17. Kegiatan perluasan ruang lingkup LSPPro-HP BBP3KP

- b. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu LSPPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012

Pemeliharaan sistem manajemen mutu dilakukan melalui penyelesaian audit kecukupan dokumen reakreditasi, rapat internal tindak lanjut temuan audit pada 21 Januari 2026, Inhouse Training Bedah SNI Produk Perikanan pada 23 Januari 2026, serta pembayaran iuran tahunan Lembaga Penilaian Kesesuaian pada 26 Januari 2026. Selanjutnya pada Februari 2026 dilakukan pengajuan dokumen hasil perbaikan melalui aplikasi KANMIS dan persiapan asesmen reakreditasi. Setelah asesmen ulang dan perluasan ruang lingkup pada 12–13 Maret 2026, dilakukan tindak lanjut temuan asesmen melalui penyusunan rencana perbaikan dan pemenuhan dokumen pendukung.



Gambar 18. Asesmen reakreditasi dan perluasan ruang lingkup oleh KAN

- c. Rapat Internal dan Penguatan Perencanaan Kegiatan LSPPro-HP
- Rapat internal dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan tahun 2026, meliputi rapat pembahasan rencana kegiatan tim kerja PKPKP

tanggal 15 Januari 2026, serta rapat internal tanggal 19 Januari 2026 terkait pembagian tugas personel, pembentukan tim LSPro-HP, serta penyusunan dan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan program, peningkatan efektivitas pelaksanaan layanan sertifikasi, serta mendukung perluasan ruang lingkup layanan LSPro-HP BBP3KP.



Gambar 19. Rapat internal dan penguatan perencanaan kegiatan LSPro-HP

7) Fasilitas Inkubasi Bisnis bagi UMKM Kelautan Perikanan

a. Pendampingan UMKM Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pendampingan penerapan GMP dan SSOP pada UMKM Levanict 88 di Ambon oleh Satker BBP3KP Ambon tanggal 9 dan 28 Januari 2026, bimbingan teknis pengolahan produk kelautan dan perikanan bersama UMKM Poklahsar Lobangahiji untuk produk rolade ikan tanggal 19 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Jeger Food tanggal 21 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, konsultasi analisa usaha cookies rumput laut tanggal 23 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, pendampingan pembuatan NIB tanggal 27 dan 29 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, dan pendampingan UMKM Le-Box (Lele dalam Box) oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu tanggal 18 Februari 2026.



Gambar 20. Pendampingan UMKM Kelautan dan Perikanan

b. Pengembangan Produk dan Diseminasi Teknologi Pengolahan

Kegiatan pengembangan produk dan diseminasi teknologi pengolahan dilaksanakan oleh Satker BBP3KP Ambon, Palabuhanratu, dan Mataram melalui uji coba produk rolade ikan tuna dan nugget ikan kakap tanggal 15 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, uji terap pembuatan gyoza tilapia tanggal 26 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, serta

pelaksanaan Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk Gyoza Tilapia sebagai narasumber pada tanggal 28 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram.

Selanjutnya, Satker BBP3KP Palabuhanratu melaksanakan uji coba produk Shrimp Spring Roll Tail On pada tanggal 2 dan 12 Februari 2026, serta berpartisipasi sebagai narasumber dalam Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan edisi Shrimp Roll pada tanggal 19 Februari 2026. Selain itu, Satker BBP3KP Palabuhanratu menerima kunjungan mahasiswi IPB University pada tanggal 24 Februari 2026 dalam rangka diseminasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan.



Gambar 21. Pelaksanaan Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk

c. Koordinasi dan Penguatan Sinergi Stakeholder

Kegiatan dilaksanakan oleh Satker BBP3KP Ambon, Palabuhanratu, dan Mataram melalui koordinasi dengan Dinas setempat, diantaranya rapat persiapan workshop nasional pada tanggal 13 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, koordinasi dengan Camat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, serta koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada tanggal 22 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Ambon.

Selanjutnya, Satker BBP3KP Palabuhanratu melaksanakan koordinasi uji kompetensi dengan SMK Bhayangkara pada tanggal 29 Januari 2026 serta rapat pembahasan usulan UMKM Tenant INVAPRO KAPE untuk Program LAUTRA pada tanggal 4 Februari 2026. Kegiatan koordinasi juga dilaksanakan pada bulan Maret 2026 dalam rangka penguatan sinergi program pengembangan kelautan dan perikanan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.



Gambar 22. Koordinasi dan Penguatan Sinergi Stakeholder

- 8) Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah
- a. Perencanaan dan Koordinasi Program Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran (UTTPP)

Kegiatan dilaksanakan melalui paparan kegiatan Tim Kerja UTTPP Tahun 2026 tanggal 13 Januari 2026 di Ruang Rapat Batari BBP3KP Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh Kepala BBP3KP, Ketua Tim Kerja UTTPP, Katimja Dukungan Manajerial, Penanggung Jawab Program, serta Tim Kerja UTTPP. Dalam kegiatan tersebut disampaikan program dan anggaran, rencana pendampingan uji terap produk bernilai tambah, pengembangan produk kelautan dan perikanan, layanan laboratorium kalibrasi, serta rencana bimbingan teknis dan *in house training* tahun 2026.

Selanjutnya, kegiatan koordinasi dilaksanakan melalui Sosialisasi Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2026 tanggal 29 Januari 2026 secara *hybrid*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Koordinator Penyuluh, serta Tim Pelaksana Kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran mekanisme, persyaratan, serta tahapan pelaksanaan pendampingan guna meningkatkan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah serta memperkuat daya saing UMKM.



Gambar 23. Perencanaan dan Koordinasi Program Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran

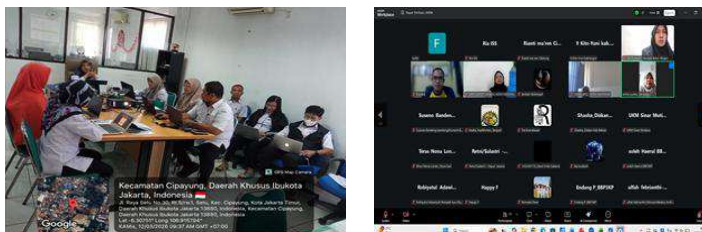
- b. Fasilitasi Uji Terap dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan fasilitasi uji terap dan pengembangan produk kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Rapat Internal Tim Kerja pada tanggal 18 Februari 2026 di Ruang Rapat UTTPP BBP3KP. Rapat ini membahas progres kegiatan fasilitasi uji terap produk kelautan dan perikanan serta inovasi produk dan teknologi pengolahan dan pemasaran. Disampaikan bahwa beberapa produk pengembangan seperti mochi rumput laut, fish kuro, akar kelapa, dan albumin telah siap dilakukan uji coba untuk memperoleh hasil yang optimal. Selain itu, dibahas pula usulan UMKM calon peserta kegiatan fasilitasi uji terap produk kelautan dan perikanan yang berasal dari 6 provinsi dan 16

kabupaten/kota sebanyak 130 usulan UMKM, dengan 99 UMKM yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pendampingan.

c. Verifikasi Calon Peserta Fasilitas Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Produk KP

Kegiatan verifikasi calon peserta fasilitas pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dilaksanakan pada bulan Maret 2026 oleh Tim Kerja Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran BBP3KP secara luring di Ruang Rapat UTTPP BBP3KP dan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim Kerja Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, UMKM calon penerap, serta pelaksana kegiatan.



Gambar 24. Verifikasi calon peserta fasilitas pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran produk KP

9) Diseminasi Masyarakat pada Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Capaian Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan bahan informasi berupa konten (media sosial, cetak, elektronik/website) dan penyebaran informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan. Capaian tersebut pada triwulan I yaitu 201 orang atau setara 13,4% dari target 1500 orang.

a. Penyusunan Bahan Informasi dan Peliputan Kegiatan

Tim Kerja Diseminasi melaksanakan peliputan dan pengambilan gambar pada 23 (dua puluh tiga) kegiatan untuk menyusun bahan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan. Peliputan dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan pada Januari 2026, 10 kegiatan pada Februari 2026, dan 4 kegiatan pada Maret 2026. Kegiatan yang diliput antara lain dokumentasi handbook, forum konsultasi pemangku kepentingan, penerapan pengolahan nori *Ulva* sp., Temu Teknis BBP3KP, pelatihan fillet ikan patin, serta asesmen KAN dan konten mutu air. Selain itu, Tim juga menyusun konten media sosial sebanyak 22 konten pada Januari 2026, 14 konten pada Februari 2026, dan

14 konten pada Maret 2026 sebagai bahan diseminasi informasi kepada masyarakat.



Gambar 25. Penyusunan Bahan Informasi dan Peliputan Kegiatan

- b. Penyebarluasan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan

Penyebarluasan informasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terhadap tugas dan fungsi, layanan, serta inovasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan oleh BBP3KP. Pada periode triwulan I, penyebarluasan informasi dilaksanakan melalui kegiatan studi lapangan *International Blue Economist Certification Training Course Batch 10* tanggal 19 Januari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan beras analog rumput laut, kunjungan Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan BRIN tanggal 5 Februari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan beras rumput laut, Festival Ikan Nusantara di Universitas Satya Negara Indonesia tanggal 13 Februari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan gyoza dan gohyong ikan tuna, kunjungan *Sustainablue Center* Universitas Indonesia tanggal 24 Februari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan beras rumput laut, serta kegiatan Pesantren Kilat Pra-Lansia Ramadhan Wanita PUI tanggal 4 Maret 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan gyoza ikan tuna.



Gambar 26. Penyebarluasan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian sebesar Rp4.218.832.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp127.674.038,- atau setara dengan 3,03%.

3.2.2

Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja.

IK 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (Persen)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBP3KP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) BBP3KP sampai dengan waktu pengukuran.

Sejak akhir tahun 2019, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan melalui aplikasi SIDAK KKP. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang tuntas ditindaklanjuti oleh BBP3KP}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBP3KP}} \times 100$$

Tabel 4. Pencapaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP

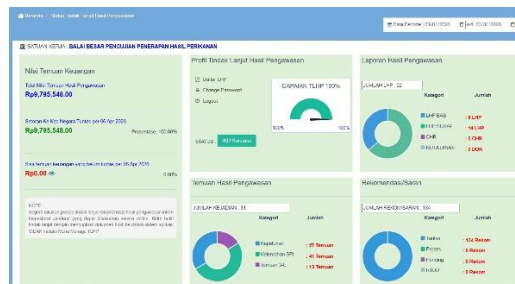
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (Persen)	95	95	95	95	100	100	100	100	105,26	105,26	0	0

Pada triwulan I tahun 2026, capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan BBP3KP adalah 100%. Capaian ini setara dengan 105,26% terhadap target triwulan I tahun 2025 yakni

95%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 95%, maka capaian triwulan I tahun 2025 telah mencapai 105,26%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yaitu 100% maka capaian ini tidak mengalami peningkatan, begitu pula jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada periode sebelumnya yaitu 100% maka capaian ini tidak mengalami peningkatan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Berdasarkan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, telah dilakukan kegiatan pemenuhan dokumen pendukung usulan perbaikan aset berupa tembok Cold Storage di lingkungan CS 2000 Ton TA 2025. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan pelampiran dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perbaikan aset tembok Cold Storage, penyusunan spesifikasi teknis perbaikan tembok Cold Storage Tahun 2025, penyusunan harga pagar panel beton per meter berdasarkan hasil survei pasar, serta penyusunan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor B.3478/BBP3KP/PL.420/XI/2025 tanggal 12 November 2025 terkait perbaikan pagar panel. Seluruh dokumen tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.



Gambar 27. Tangkapan layar aplikasi SIDAK KKP triwulan I tahun 2026

- 2) Berdasarkan aplikasi SIDAK KKP, dari 22 LHP terdapat 81 temuan dengan 129 rekomendasi. Dari 134 rekomendasi tersebut, semuanya dinyatakan tuntas.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BBP3KP sebesar Rp1.499.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi.

IK 3. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP (Persen)

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP adalah jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2025. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2025}} \times 100\%$$

Tabel 5. Pencapaian Indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP (Persen)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP ditargetkan sebesar 100%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Penyampaian penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2025 secara daring tanggal 05 Januari 2026.
- 2) Kegiatan pra-rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode semester II tahun 2024 tanggal 7-8 Januari 2026.



Gambar 28. Dokumentasi Pra rekonsiliasi Laporan keuangan dan Laporan Barang milik negara (BMN) satker Lingkup ditjen PDSPKP

- 3) Menghadiri undangan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) satker lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 12 Januari 2026 di Raiser Ikan Hias Cibinong.



Gambar 29. Rekonsiliasi Laporan keuangan dan Laporan Barang milik negara (BMN) satker Lingkup ditjen PDSPKP

- 4) Menghadiri undangan rekonsiliasi Laporan keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 13-15 Januari 2026 di Gedung Minabahari III Lantai 14 Ruang Rapat Mutiara.



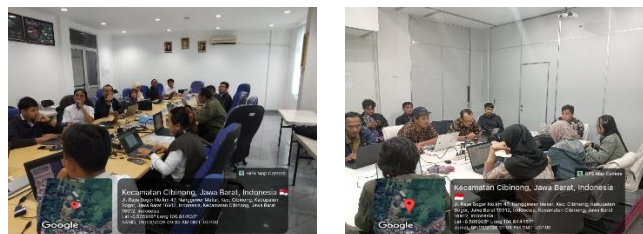
Gambar 30. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker lingkup Ditjen PDSPKP

- 5) Rapat perihal Mobil Berpendingin di Muara Baru tanggal 04 Februari 2026.



Gambar 31. Rapat perihal Mobil Berpendingin

- 6) Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2025 dan monitoring progres pengadaan barang/ jasa tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, di Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor pada tanggal 5-6 Maret 2026.



Gambar 32. Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2025 dan monitoring progres pengadaan barang/ jasa tahun 2026

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP sebesar Rp1.499.000,-

sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp315.000,-

IK 4. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)

WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memastikan nilai komponen hasil “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25 untuk Menuju WBK dengan ketentuan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60 untuk Menuju WBK, serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50 untuk Menuju WBK;
- d. Memastikan nilai komponen hasil “Pelayanan publik yang prima” minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBK.

Pada Tahun 2026, Tim Pelaksana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBP3KP yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Tim Nomor B.19BBP3KP/KP.440/I/2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pemenuhan kriteria penilaian Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai BBP3KP. Dalam memperkuat pengawasan, BBP3KP juga membentuk tim penanganan pengaduan, tim unit penanganan gratifikasi, dan tim penanganan benturan kepentingan.

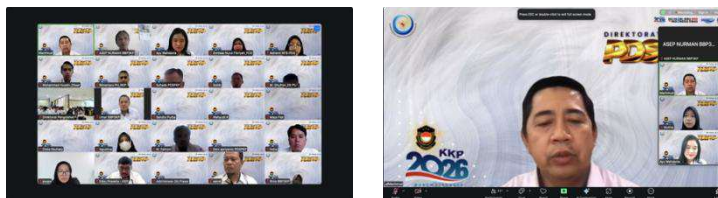
Tabel 6. Pencapaian indikator nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	-	75	-	75	-	90,94	-	-	-	-	-	-

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP ditargetkan sebesar 75. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Penyusunan tim pelaksana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) BBP3KP. Surat penugasan tersebut disahkan tanggal 02 Januari 2026 dengan Nomor B.02/BBP3KP/KP.440/I/2026 tentang penugasan tim pelaksana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) BBP3KP.
- 2) Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 05 Januari 2026 melalui *zoom meeting*.



Gambar 33. Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP bulan Januari

- 3) Apel pagi dan Morning Briefing Reformasi Birokrasi lingkup Dirjen PDSPKP tanggal 12 Januari 2026 yang diikuti Seluruh Pegawai BBP3KP.



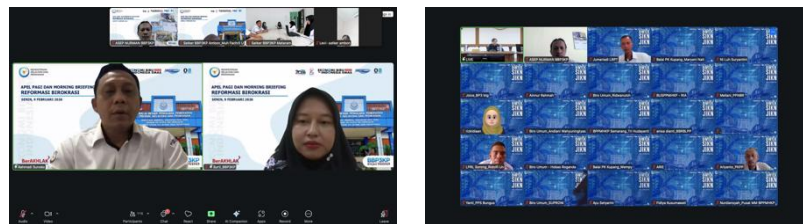
Gambar 34. Dokumentasi apel pagi dan morning Briefing Reformasi Birokrasi lingkup Dirjen PDSPKP

- 4) Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP melalui *zoom meeting* tanggal 02 Februari 2026.



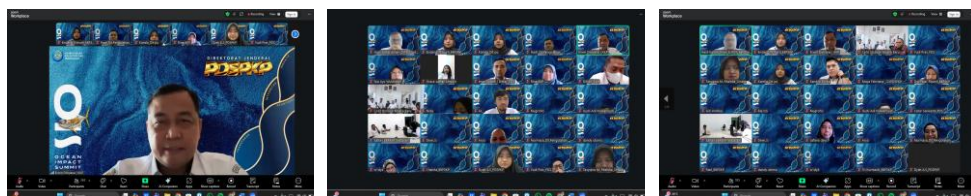
Gambar 35. Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP

- 5) Kegiatan apel pagi dan *morning briefing* WBK/WBBM lingkup BBP3KP melalui *zoom meeting* tanggal 09 Februari 2026.



Gambar 36. Kegiatan apel pagi dan morning briefing WBK/WBBM lingkup BBP3KP

- 6) Asistensi dan pemantauan mandiri PZI oleh Inspektorat Jenderal IV tanggal 19 - 25 Februari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) migrasi dokumen repositori dari gdrive ke <https://portal-repo.kkp.go.id/s/SZZfyQL6A2764HC>, b) Pemutakhiran data dukung, dan c) Penilaian mandiri dan Pemantauan pada aplikasi E-Zi.
- 7) Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP melalui *zoom meeting* tanggal 02 Maret 2026.



Gambar 37. Apel pagi lingkup Ditjen PDSPKP

- 8) Kegiatan apel pagi dan *morning briefing* WBK/WBBM lingkup BBP3KP melalui *zoom meeting* tanggal 09 Maret 2026.



Gambar 38. Apel pagi dan morning briefing WBK/WBBM lingkup BBP3KP bulan Maret

- 9) Pemenuhan rencana kerja serta bukti dukung seluruh area dari bulan Januari hingga Maret 2026.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BBP3KP sebesar Rp10.611.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi.

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBP3KP (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Nilai PM SAKIP BBP3KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BBP3KP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BBP3KP.

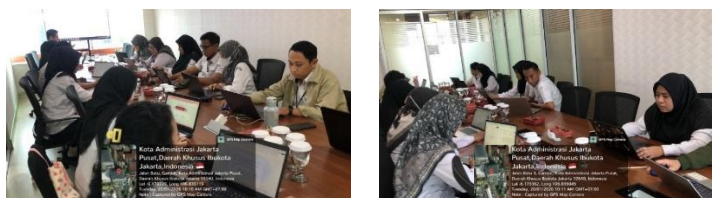
Tabel 7. Pencapaian indikator nilai penilaian mandiri SAKIP BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBP3KP (Nilai)	-	86	-	86,2	-	87,2	-	-	-	-	-	-

Nilai penilaian mandiri SAKIP BBP3KP ditargetkan sebesar 86,2. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Verifikasi capaian kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) tanggal 2 Januari 2026 di RR Sekretariat Ditjen PDSPKP. Agenda kegiatan meliputi verifikasi capaian kinerja di aplikasi SAPK (Kinerjaku) dan data dukungnya. Nilai Kinerja Organisasi BBP3KP untuk TA 2025 sebesar 112,84 dengan kategori “istimewa”.



Gambar 39. Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)

- 2) Finalisasi pelaporan kegiatan yang mendukung Kebijakan Ekonomi Biru lingkup PDSPKP TA 2025 tanggal 5 Januari 2026 di RR Setditjen PDSPKP. Penginputan pada tautan https://bit.ly/BE_PDS_2025, dan pengecekan terkait isian alokasi anggaran efektif dengan alokasi anggaran pada masing-masing RO baik untuk *Blue Economy 2* maupun *Blue Economy 3*, realisasi anggaran dan realisasi output pada masing-masing RO, serta keterangan yang ditulis sebagai kegiatan yang mencerminkan dan mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Lingkup PDSPKP TA 2025.



Gambar 40. Finalisasi pelaporan kegiatan yang mendukung Kebijakan Ekonomi Biru lingkup PDSPKP TA 2025

- 3) Rapat pengisian evaluasi rencana aksi level 1 dan 2 periode triwulan IV tahun 2025 tanggal 6 Januari 2026 di RR Sekretariat GMB 3. Evaluasi rencana aksi triwulan 4 tahun 2025 diisi berdasarkan perubahan PK 2025 yang sudah disepakati dan ditandatangani Dirjen PDSPKP dan alokasi anggaran berdasarkan revisi terakhir serta realisasi anggaran. Penginputan pada link <https://bit.ly/EvaluasiRencanaAksiTwIV2025PDS> dan pengecekan terkait isian capaian evaluasi rencana aksi serta realisasi anggaran



Gambar 41. Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 Periode Triwulan IV tahun 2025

- 4) Pembahasan tingkat kepatuhan pengelolaan data tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026 di RR Sekretariat Lt 14 PDSPKP, GMB III. Agenda pembahasan meliputi: a) capaian sementara IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan IKU di Sekretariat Ditjen PDSPKP yakni sekitar 67% dari target 100% dari komponen persentase data produksi KP yang tervalidasi, dan b) Pembagian lembar kerja data produksi VPO semester 1 tahun 2025 dengan berstatus valid OPD Provinsi sebanyak 36 a.k.a 36 Kabupaten/Kota.
- 5) Pengisian informasi perencanaan kinerja pasca penetapan SOTK baru lingkup Ditjen PDSPKP pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) dan pengisian capaian kinerja pada tanggal 8 Januari 2026 di RR Sekretariat Lt 14 PDSPKP, GMB III. Sebelum SOTK baru, BBP3KP mengampu sebanyak 14 indikator Kinerja, pasca SOTK baru menjadi 9 indikator kinerja. Perubahan lainnya yaitu mengubah target IP ASN dari 87 menjadi 81, dan mengubah pola hitung pada IKK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)” dari RR (rata-rata) menjadi PA (Posisi Akhir).



Gambar 42. Pengisian informasi perencanaan kinerja pasca penetapan SOTK baru lingkup Ditjen PDSPKP pada SAPK

- 6) *Entry meeting* reviu LKj level 1 periode triwulan IV tahun 2025 tanggal 28 Januari 2026 di RR. Sekretariat Ditjen PDSPKP. Laporan kinerja level 1 mencerminkan kinerja level 2 dari aspek strategis hingga kegiatan.



Gambar 43. *Entry meeting* reviu LKj level 1 periode triwulan IV tahun 2025

- 7) Temu teknis Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) tahun 2026 yang diselenggarakan tanggal 10-12 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu perwakilan Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, serta narasumber internal KKP, yaitu Plt. Direktur Jenderal PDSPKP, Kepala BBP3KP, perwakilan PUSDATIN, serta Koordinator Pelaksana Kegiatan lingkup BBP3KP. BBP3KP berkomitmen mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, melalui program dan kegiatan (a) Peningkatan Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian; (b) Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah; (c) Inkubasi Bisnis dan Pengembangan Usaha; (d) Diseminasi Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan; dan (e) Layanan Dukungan Manajerial.



Gambar 44. Temu teknis BBP3KP tahun 2026

- 8) Penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan Ditjen PDSPKP tahun 2025 tanggal 20 Februari 2026. Laporan berupa kegiatan untuk masing-masing

rincian output yaitu sebanyak minimal dua kegiatan besar baik dari sisi pengalokasikan anggaran, pelibatan stakeholder, dan dokumentasi.

- 9) Rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja tanggal 10 Maret 2026 di Ruang Rapat Setditjen PDSPKP. Kegiatan bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Target IKK, Rencana Aksi, laporan kinerja, output capaian pada aplikasi Kinerjaku, serta data dukung lainnya. Seluruh dokumen diunggah ke laman <https://esr.menpan.go.id/>.



Gambar 45. Rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Nilai penilaian mandiri SAKIP BBP3KP sebesar Rp36.706.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp2.210.000,- atau setara dengan 6,02%.

IK 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu:

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dan pagu minus);
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap

- peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran (data kontrak, pengelolaan UP/TUP, LPJ bendahara, dan dispensasi SPM);
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran (penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D); dan
 4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA (kesalahan SPM, dan perencanaan kas).

Pada Tahun 2026 terdapat reformulasi IKPA sebagai berikut :



Gambar 46. Reformulasi IKPA 2026

Langkah-langkah yang akan ditempuh guna meningkatkan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran BBP3KP, antara lain:

- a. Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran:
 - melakukan revisi DIPA secara selektif dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran;
 - memastikan pelaksanaan anggaran berjalan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
 - melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
 - mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- b. Pada aspek kepatuhan atas regulasi:
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data supplier dan data kontrak. Data kontrak disampaikan ke KPPN tepat

waktu (paling lambat 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani/tanggal kontrak);

- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP;
- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara. (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya);
- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian SPM terutama pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.

c. Pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan:

- meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D;
- mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan;
- memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai. SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).

d. Pada aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan:

- meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
- meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.

Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	-	92	-	92,1	-	92,17	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP ditargetkan sebesar 92,1. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat

dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Menyusun laporan bulanan kelompok keuangan.
- 2) Mengajukan usulan gaji induk, uang makan, dan tunjangan kinerja pegawai BBP3KP.
- 3) Mengajukan usulan honorarium PPNPN Januari sampai dengan Maret 2026.
- 4) Pengajuan dan Penyesuaian RPD Periode Triwulan I 2026
- 5) Melakukan revisi RKAKL DIPA 1, dengan tanggal terbit 2 Januari 2026.
- 6) Melakukan revisi RKAKL DIPA 2, dengan tanggal terbit 20 Januari 2026.
- 7) Melakukan revisi RKAKL DIPA 3, dengan tanggal terbit 27 Januari 2026.
- 8) Melakukan revisi RKAKL DIPA 4, dengan tanggal terbit 20 Februari 2026.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP sebesar Rp23.094.783,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp4.803.226,- atau setara dengan 20,80%,.

IK 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan Kinerja Perencanaan Anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Variabel efisiensi dengan uraian capaian indikator RO memiliki bobot 75%. Variabel efisiensi yang terdiri atas 2 (dua) uraian yaitu nilai efisiensi Satker dengan bobot 10% dan efisiensi SBK dengan bobot 15%. Kategori capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: a) Sangat Baik, apabila

NKA > 90, b) Baik, apabila NKA >80 – 90, c) Cukup, apabila NKA >60 – 80, d) Kurang, apabila NKA >50 – 60, dan e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50

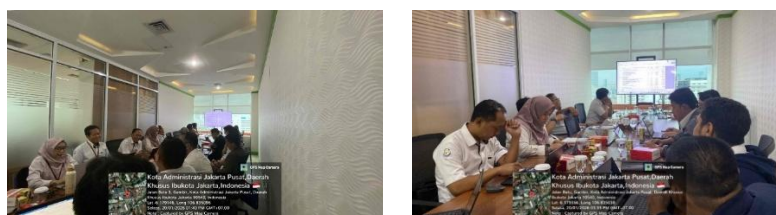
Tabel 9. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I TW I 2025	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026 Tahun 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2024	TW I 2026	TW IV 2025			TW I 2026	TW I 2024
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	-	81	-	81,5	-	86,33	-	-	-	-	-	-

Nilai kinerja perencanaan anggaran BBP3KP ditargetkan sebesar 71,5. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan BBP3KP pada triwulan I dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja di atas:

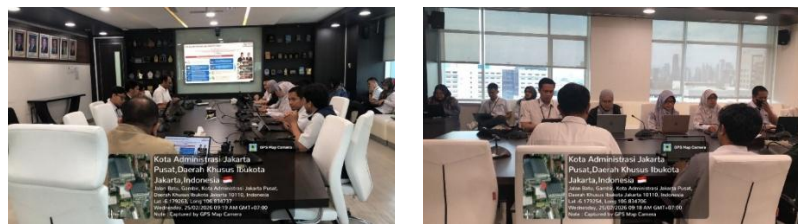
- 1) Penginputan capaian output melalui aplikasi SAKTI yang saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi Monev Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput.
- 2) Menghadiri rapat pembahasan terkait kegiatan anggaran pemberdayaan masyarakat (aspirasi) tanggal 20 Januari 2026 di RR Setditjen PDSPKP.



Gambar 47. Pembahasan terkait kegiatan anggaran pemberdayaan masyarakat (aspirasi)

- 3) Pembahasan tagging anggaran Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan *Blue Economy* tanggal 25 Februari 2026 di RR Mutiara GMB 3, Jakarta. Penetapan *tagging* berdasarkan pagu anggaran yang tercantum dalam RKAKL eksisting pasca efisiensi, dan volume target output berdasarkan usulan penyesuaian volume target pasca efisiensi yang akan dibahas dalam

Trilateral Meeting KKP dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, bukan berdasarkan target DIPA awal yang belum berubah pasca efisiensi.



Gambar 48. Pembahasan Tagging Anggaran Ditjen PDSPKP dalam Mendukung Kebijakan Blue Economy

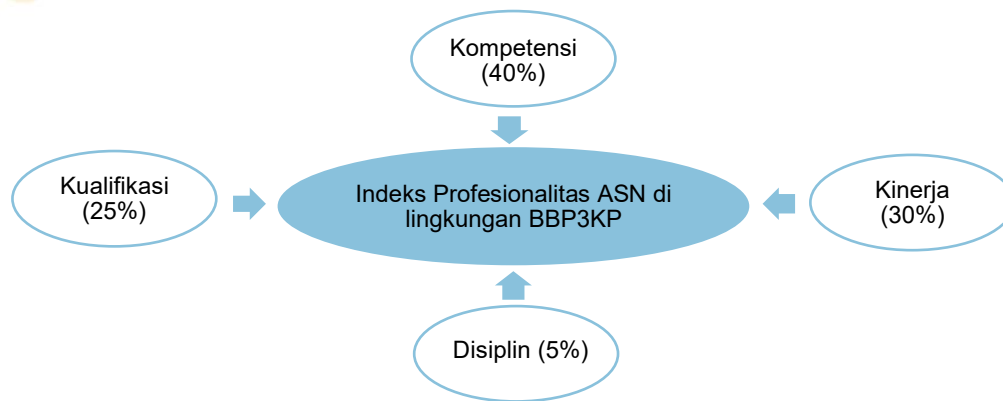
BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian nilai kinerja perencanaan anggaran BBP3KP sebesar Rp59.369.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp3.229.000,- atau setara dengan 5,44%.

IK 8. Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus.

Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Bobot komponen penilaian IP ASN dapat dilihat pada Gambar 93.



Gambar 49. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP

Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP. Pada tahun 2026, indikator kinerja di atas diukur dengan periode semesteran, berdasarkan pemantauan pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id/>.

Tabel 10. Pencapaian indikator indeks profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)	-	87	-	81,5	-	88,74	-	-	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN BBP3KP ditargetkan sebesar 81,5. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

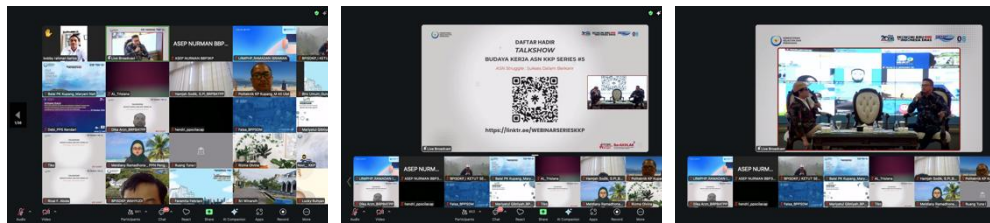
Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Rapat koordinasi persiapan pengadaan PJLP di GMB 3 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2026.
- 2) Melaksanakan wawancara pengadaan PJLP pada tanggal 09 Januari 2026.
- 3) Usulan penghargaan ASN Tahun 2026 di lingkungan KKP secara daring pada tanggal 15 Januari 2026.
- 4) Monitoring dan evaluasi pegawai triwulan IV tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP di GMB III tanggal 19 Januari 2026.



Gambar 50. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Pegawai Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

- 5) Mengikuti Talkshow Budaya Kerja ASN KKP dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang semakin cepat secara daring pada tanggal 20 Januari 2026.



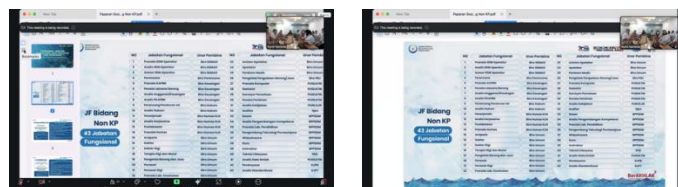
Gambar 51. Dokumentasi Talkshow Budaya Kerja ASN KKP Dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang semakin cepat

- 6) Verifikasi Satyalancana Karya Satya (SLKS) KKP melalui *zoom meeting* tanggal 30 Januari 2026.
- 7) Pemetaan konversi jabatan Non ASN ke Jabatan Pelaksana dan Penyusunan ABK Jabatan Pelaksana di GMB III, KKP, Jakarta tanggal 05 Februari 2026.



Gambar 52. Pemetaan Konversi Jabatan Non ASN ke Jabatan Pelaksana dan Penyusunan ABK Jabatan Pelaksana

- 8) Kegiatan sosialisasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Non Bidang Kelautan dan Perikanan via daring (*zoom*) tanggal 26 Februari 2026.



Gambar 53. Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Non Bidang Kelautan dan Perikanan

- 9) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Microsoft Word dalam rangka Pemenuhan Data Dukung E-Kinerja Lingkup BBP3KP Tahun 2026 tanggal 10 dan 12 Maret 2026.



Gambar 54. Kegiatan Pelatihan Microsoft Word lingkup BBP3KP

- 10) Rekonsiliasi data kepegawaian dan implementasi DMS-SIASN lingkup Ditjen PDSPKP melalui daring tanggal 27 Maret 2026.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN BBP3KP sebesar Rp38.742.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp850.000,- atau setara dengan 2,19%.

IK 9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian unit kearsipan II menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Aspek pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%)
 - a. Sub Aspek Pengendalian Naskah Dinas (10%)
 - b. Sub Aspek Penggunaan Arsip (25%)
 - c. Sub Aspek Pemeliharaan Arsip (35%)
 - d. Sub Aspek Penyusutan Arsip (30%)
2. Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan (bobot 40%)

- a. Sub Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan (50%)
- b. Sub Aspek Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)

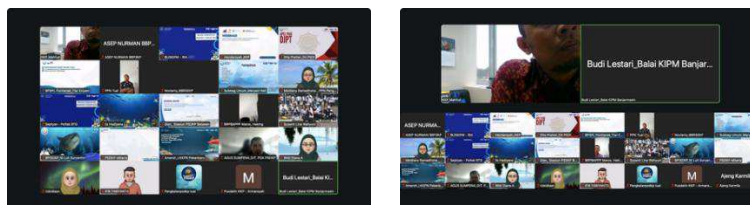
Tabel 11. Pencapaian indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP (Nilai)	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP ditargetkan sebesar 81. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Sosialisasi akun portal tanggal 02 Januari 2026 melalui *zoom meeting*.



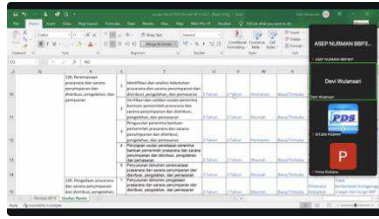
Gambar 55. Dokumentasi Sosialisasi Akun Portal

- 2) Kegiatan sosialisasi Aplikasi Super Apps KKP secara daring tanggal 12 Januari 2026.



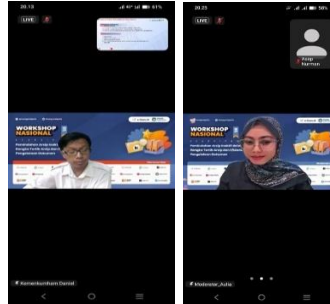
Gambar 56. Dokumentasi sosialisasi Aplikasi Super Apps KKP

- 3) Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip secara daring pada tanggal 13 Januari 2026.



Gambar 57. Dokumentasi Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip

- 4) Pembahasan pemindahan arsip inaktif dalam rangka tertib arsip dan efisiensi secara daring yang diselenggarakan oleh E-Guru tanggal 27 Januari 2026.



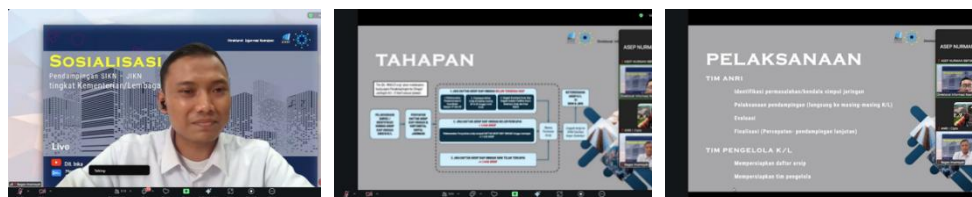
Gambar 58. Dokumentasi Pembahasan Pemindahan Arsip Inaktif dalam rangka tertib arsip dan efisiensi yang diselenggarakan oleh E-Guru

- 5) Sosialisasi sertifikasi SDM Kearsipan melalui *zoom meeting* tanggal 05 Februari 2026.



Gambar 59. Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan

- 6) Rapat persiapan pendampingan program percepatan peningkatan simpul jaringan di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) via daring (zoom) pada tanggal 06 Februari 2026
- 7) Bimbingan teknis pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) melalui *zoom meeting* tanggal 11 Februari 2026.



Gambar 60. Bimbingan Teknis Pengelolaan SIKN dan JIKN

- 8) Penerapan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) lingkup KKP dan penilaian arsip usul musnah melalui daring tanggal 12 Maret 2026.



Gambar 61. Penerapan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) lingkup KKP dan penilaian arsip usul musnah

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP sebesar Rp12.935.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi.

IK 10. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Mudah disebarakan
5. Berkelanjutan

KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Terdapat dua aspek penilaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP yaitu aspek penilaian kelompok umum dan aspek penilaian kelompok khusus. Aspek penilaian kelompok umum terdiri atas: (a) ringkasan (5%); (b)

ide inovatif (20%); (c) signifikansi (25%); (d) kontribusi terhadap capaian TPB (5%); (e) adaptabilitas (20%); (f) keberlanjutan (20%); dan (g) kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus terdiri atas: (a) pembaruan / peningkatan Inovasi (25%); (b) adaptabilitas (20%); (c) penguatan keberlanjutan (25%) dan (d) evaluasi (30%). Formula pengukuran indikator kinerja ini yaitu Eselon II yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I, dengan target hasil yaitu proposal inovasi unit kerja level II yang ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilaian Eselon I.

Formula pengukuran indikator ini yaitu inovasi pelayanan publik Eselon II yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I. Target hasil proposal inovasi unit kerja level II yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilaian Eselon I.

Tabel 12. Pencapaian indikator inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	s.d TW I 2026			TW IV 2025	TW I 2025
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP ditargetkan sebesar 1 inovasi. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2026 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas yaitu menghadiri rapat pembahasan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tanggal 06 Maret 2026 di RR. Raiser Ikan Hias Cibinong. Kegiatan dipimpin oleh Tim Kerja Data dan Layanan Publik, dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin KP, eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, Tim Kerja SDMAO dan RB, dan Tim Kerja Data dan Layanan Publik. Berdasarkan informasi dari Pusdatin, selama inovasi belum mendapat penghargaan OPSI dari KemenPANRB, maka masih bisa

diajukan. Dengan demikian, Invapro Kape masih dapat diusulkan kembali. Adapun usulan baru yang mungkin diajukan oleh BBP3KP yaitu Mobil Alih Teknologi dan Informasi (Mobil ATI). Saat ini, Mobil ATI telah memiliki data dukung seperti daftar hadir dan kuesioner yang bisa diolah karena jumlah penerima informasi termasuk dalam indikator kinerja.



Gambar 62. Rapat pembahasan proposal KIPP

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP sebesar Rp9.480.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum terdapat realisasi.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2026

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBP3KP pada Tahun 2026 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBP3KP Nomor: DIPA-032.06.2.427686/2026 tanggal 11 Desember 2025 dengan pagu Rp32.409.892.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun karena adanya revisi pegeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 . .

Realisasi Anggaran BBP3KP per Rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 13. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan

Kegiatan	Output	Pagu Awal	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
5279. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5279.ADA.002 Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	543.180.000	23.590.000	519.590.000	4,34
	5279. ADA.003 Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	452.868.000	40.278.270	412.589.730	8,89
	5279.ADA.004 Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	170.764.000	22.746.000	148.018.000	13,32

Kegiatan	Output	Pagu Awal	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
	5279.AEF.001 Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	262.262.000	15.677.486	246.584.514	5,98
	5279.DDA.001 Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	314.787.000	25.382.282	289.404.718	8,06
	5279.QDG.001 UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	2.474.971.000	0	2.474.971.000	0
	2361.AEA.001 Koordinasi Pengelolaan Manajerial	94.275.000	4.419.000	94.275.000	4,69
	2361.EBA.962 Layanan Umum	98.034.000	4.860.000	93.174.000	4,96
	2361.EBA.994 Layanan Perkantoran	23.042.018.000	4.799.058.326	18.242.959.674	20,83
	2361.EBB.951 Layanan Sarana Internal Ditjen PDSPKP	25.000.000	0	25.000.000	0
	2361.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.800.000	1.020.000	780.000	56,67
	2361.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	5.996.000	630.000	5.336.000	10,51
JUMLAH		27.485.955.000	4.937.661.364	22.548.293.636	17,69

Pada triwulan I tahun 2026, penyerapan anggaran BBP3KP adalah Rp27.485.955.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan 17,69% terhadap total pagu anggaran awal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja periode triwulan I tahun 2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja BBP3KP, telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai target indikator kinerja.

Secara umum, indikator kinerja BBP3KP yang dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2026 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 118,09%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, realisasi seluruh indikator kegiatan dengan periode triwulan I tahun 2026 telah tercapai. Adapun permasalahan yang dihadapi selama triwulan I serta rekomendasinya sebagai berikut:

Tabel 14. Permasalahan dan rekomendasi periode triwulan I tahun 2026

No.	Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi
1.	Layanan Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan kegiatan surveilan memerlukan waktu tambahan untuk koordinasi dan mobilisasi tim, mengingat sebaran lokasi klien yang beragam dan memerlukan penyesuaian jadwal.	Menyelesaikan Kaji Ulang Permohonan untuk dapat dievaluasi pada bulan April dan memastikan kesiapan klien untuk dilakukan survailen

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja BBP3KP triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa- masa mendatang.

Lampiran 1. Salinan PK Level 2 BBP3KP Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rahmadi Sunoko**
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Machmud**
Jabatan : Ptl. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Ptl. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Machmud

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



Rahmadi Sunoko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian	1. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	75
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBP3KP (Persen)	95
	3. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP (Persen)	100
	4. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBP3KP (Nilai)	86,2
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	92,1
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBP3KP (Nilai)	71,75
	8. Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP (Indeks)	81,5
	9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBP3KP (Nilai)	81
	10. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	4.218.832.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	23.267.123.000
Total Anggaran Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2026	27.485.955.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Ptl. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Machmud

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan



Rahmadi Sunoko

Lampiran 2. Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
1	PT. Dunia Hijau (Firnas) Wijaya Grand Center Blok E.IA Lt-3 JL. Wijaya II Pulo, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA (12160)	1	SAJO Makarel Pike 300g	Histamin	1		1
				Bobot tuntas	1		
				Filth	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		2	SAJO Makarel 300g	Histamin	1		1
				Bobot tuntas	1		
				Filth	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		3	SAJO Tuna Mild 100g	Histamin	1	1	
				Bobot tuntas	1		
				Filth	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		4	SAJO Tuna Cigae 100g	Histamin	1	1	
				Bobot tuntas	1		
				Filth	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		5	SAJO Tuna Spicy 100g	Histamin	1	1	
				Bobot tuntas	1		
				Filth	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		6	SAJO Tuna Salkogi 100g	Histamin	1	1	
				Bobot tuntas	1		
				Filth	1		
				Organoleptik/sensori	1		
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Rita) Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Dadi Mulya, Samarinda,	7	Abon kepiting rajungan Kampoeng Timoer	ALT aerob	1	1	
		8	Abon kepiting rajungan Kampoeng Timoer	ALT aerob	1	1	
		9	Abon kepiting rajungan Kampoeng Timoer	ALT aerob	1	1	
		10	Abon kepiting rajungan	ALT aerob	1	1	

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
			Kampoeng Timoer				
		11	Abon kepiting rajungan Kampoeng Timoer	ALT aerob	1		1
3	Timja PK BBP3KP	12	Otak-otak ikan	Kadar protein	1	1	
4	Timja UJT BBP3KP	13	A Tulang Hiu	Fe	1	1	
				Mg	1		
				Ca	1		
				K	1		
		14	B Kulit Hiu	Fe	1	1	
				Mg	1		
				Ca	1		
				K	1		
		15	C Hisit Hiu	Kadar air	1	1	
				Kadar abu	1		
				Kadar protein	1		
				Kadar lemak	1		
				Fe	1		
				Mg	1		
				Ca	1		
				K	1		
5	CV PESONA MUSI Jl. Kol H. Burlan, Lr. Sukawana No. 19, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar Palembang Sumatera Selatan 30151 corp.pesonamusi@gmail.com Dicky Poerwadi 0818805577	16	KULIT VAKUM BEKU	ALT	1	1	
				S. Aureus	1		
		17	KULIT VAKUM BEKU	ALT	1		1
				S. Aureus	1		
		18	KULIT VAKUM BEKU	ALT	1		1
				S. Aureus	1		
		19	KULIT VAKUM BEKU	ALT	1	1	
				S. Aureus	1		
		20	KULIT VAKUM BEKU	ALT	1	1	
				S. Aureus	1		
		21	KAPAL SELAM VAKUM BEKU	ALT	1		1
				S. Aureus	1		
		22	ADAAN VAKUM BEKU	ALT	1	1	
				S. Aureus	1		

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
6	Mintur UTTPP BBP3KP	S.	23	ADAAN VAKUM BEKU	ALT	1	
					<i>S. Aureus</i>		
			24	Pempek	aw	1	
			25	Ikan bandeng cabut duri (Non Sorbitol)	Sensori	1	
					Jumlah duri		
					ALT		
			26	Ikan bandeng cabut duri (Sorbitol)	Sensori	1	
					Jumlah duri		
					ALT		
			27	Ikan bandeng segar (Non Sorbitol)	Sensori	1	
			28	Ikan bandeng segar (Sorbitol)	Sensori	1	
			29	Ikan bandeng (Air proses produksi pengolahan)	Escherichia coli	1	1
					Coliform		
			30	Ikan bandeng (Es kristal proses produksi pengolahan)	Escherichia coli	1	1
					Coliform		
7	PT. Asia Prima Makmur Tangerang HP. +62 853-1134-8870		31	abt Ikan Mackerel dalam Saus Tomat 155g	Berat Tuntas	1	
			32	S&K Ikan Mackerel dalam Saus Tomat 155g	Berat Tuntas	1	

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
8	KOMIRA Jakarta	33	Ikan kembung beku	Sensori	1	1	
9	Mintur UTTPP BBP3KP	S.	34	Nila	Sensori	1	
			35	Lele	Sensori	1	
			36	Patin	Sensori	1	
10	Dhias LSPPro-HP BBP3KP Poklahsar Dinari, Cianjur	W	37	Otak-otak Ikan (1.000 gram OI1000)	Filth	1	
					Formalin	1	
					Organoleptik/sensori	1	
			38	Otak-otak Ikan (1.000 gram OI1000)	ALT	1	
					S. Aureus	1	
					Salmonella	1	
			39	Otak-otak Ikan (1.000 gram OI1000)	ALT	1	
					S. Aureus	1	
					Salmonella	1	
			40	Otak-otak Ikan (1.000 gram OI1000)	ALT	1	
					S. Aureus	1	
					Salmonella	1	
			41		ALT	1	

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
			Otak-otak Ikan (1.000 gram OI1000)	<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		42	Otak-otak Ikan (1.000 gram OI1000)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		43	Otak-otak Ikan (500 gram OI500)	Filth	1	1	
				Formalin	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		44	Otak-otak Ikan (500 gram OI500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		45	Otak-otak Ikan (500 gram OI500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		46	Otak-otak Ikan (500 gram OI500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		47	Otak-otak Ikan (500 gram OI500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		48	Otak-otak Ikan (500 gram OI500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		49	Otak-otak ikan sayur (1.000 gram OIS1000)	Filth	1	1	
				Formalin	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		50	Otak-otak ikan sayur (1.000 gram OIS1000)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		51	Otak-otak ikan sayur (1.000 gram OIS1000)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		52	Otak-otak ikan sayur (1.000 gram OIS1000)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		
		53	Otak-otak ikan sayur (1.000 gram OIS1000)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				<i>Salmonella</i>	1		

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
		54	Otak-otak ikan sayur (1.000 gram OIS1000)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				Salmonella	1		
		55	Otak-otak ikan sayur (500 gram OIS500)	Filth	1	1	
				Formalin	1		
				Organoleptik/sensori	1		
		56	Otak-otak ikan sayur (500 gram OIS500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				Salmonella	1		
		57	Otak-otak ikan sayur (500 gram OIS500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				Salmonella	1		
		58	Otak-otak ikan sayur (500 gram OIS500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				Salmonella	1		
		59	Otak-otak ikan sayur (500 gram OIS500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				Salmonella	1		
		60	Otak-otak ikan sayur (500 gram OIS500)	ALT	1	1	
				<i>S. Aureus</i>	1		
				Salmonella	1		
11	Rita 081314048264 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1 Dadi Mulya, Samarinda, Kota samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75123	61	Abon Kepiting Rajungan (Abon Kepiting Rajungan Pedas Kampoeng Timoer)	ALT	1	1	
		62	Abon Kepiting Rajungan (Abon Kepiting Rajungan Pedas Kampoeng Timoer)	ALT	1	1	
		63	Abon Kepiting Rajungan (Abon Kepiting Rajungan Pedas	ALT	1	1	

No	Asal Contoh	Contoh	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk	
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu
			Kampoeng Timoer)				
		64	Abon Kepiting Rajungan (Abon Kepiting Rajungan Pedas Kampoeng Timoer)	ALT	1	1	
		65	Abon Kepiting Rajungan (Abon Kepiting Rajungan Pedas Kampoeng Timoer)	ALT	1	1	
12	Gusti AN Tim Penilaian Kesesuaian BBP3KP CV Sakana Indo Prima	66	Otak -otak ikan (Otak - otak panjang CV Sakana Indo Prima)	ALT	1	1	
		67	Otak -otak ikan (Otak - otak panjang CV Sakana Indo Prima)	ALT	1	1	
		68	Otak -otak ikan (Otak - otak panjang CV Sakana Indo Prima)	ALT	1	1	
		69	Otak -otak ikan (Otak - otak panjang CV Sakana Indo Prima)	ALT	1	1	
		70	Otak -otak ikan (Otak - otak panjang CV Sakana Indo Prima)	ALT	1	1	
Total		70			163	62	8

Lampiran 3. Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)

No	Nama Produk	Lokasi	Merek	Nama Klien	Jenis layanan
TW 1					
1	Makerel dalam kemasan kaleng	Batam	Jojo	PT Srijaya Raya Perkasa	Evaluasi awal
2	Otak-Otak Ikan	Cianjur	Dinari	Poklahsar Dinari	Surveilan pertama
3	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Frabelle	PT Sinar Pure Foods International	Surveilan pertama
4	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Isabella	PT Sinar Pure Foods International	Surveilan pertama
5	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Pantai Manado	PT Sinar Pure Foods International	Surveilan pertama
6	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Sinar	PT Sinar Pure Foods International	Surveilan pertama
7	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Tuna Royale	PT Sinar Pure Foods International	Surveilan pertama
8	Pempek	DI Yogyakarta	Ny. Kamto	CV Karya Produk Kamto	Surveilan pertama
9	Tahu Tuna	DI Yogyakarta	Bu Hirto	UKM Olahan Tuna Bu Hirto	Surveilan pertama

Lampiran 4. Data Penambahan Ruang Lingkup Layanan Tahun 2026

No	Nama Produk/ Judul SNI	Nomor SNI
1	Udang berlapis tepung (<i>breaded</i>) beku	SNI 6163:2017
2	Stik kepiting analog (<i>imitation crab stick</i>)	SNI 8440:2017
3	Keripik belut (<i>Monopterus albus</i>)	SNI 7687.1:2013 SNI 7687.2:2013 SNI 7687.3:2013
4	Rendang ikan tuna	SNI 8269:2016
5	Keripik ikan	SNI 8644:2018
6	Dendeng ikan	SNI 8645:2018
7	Keripik kulit ikan goreng	SNI 9013:2021
8	Ikan, moluska, krustasea, ekinodermata kering tawar	SNI 9104:2022
9	Sosis ikan	SNI 7755:2013
10	Chikuwa	SNI 8643:2018
11	Lumatan ikan	SNI 8813:2019
12	Nori	SNI 9105:2022
13	Filet ikan beku	SNI 2696:2020
14	Ikan beku	SNI 4110:2020
15	Ikan Segar	SNI 2729:2021

Lampiran 5. Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Penerima Informasi (orang)	Jenis Kelamin		Nilai SKM
				L	P	
1.	Kunjungan Maritim Muda Nusantara	19 Januari 2026	31	13	18	91,73
2.	Pameran pada Forum Pemangku Kepentingan	22 Januari 2026	14	6	8	93,89
3.	Kegiatan diseminasi informasi dan layanan publik pada kegiatan Festival Ikan Nusantara di Universitas Satya Negara Indonesia	13 Februari 2026	105	45	60	88,22
4.	Edukasi Cara Membuat Menu Takjil dari Ikan, Pesantren Kilat Pra Lansia Ramadhan, Wanita PUI	4 Maret 2026	51	0	51	80,08
Total			201	64	137	88,48 (Kategori Baik)

BBP3KP

Jl. Raya Setu No. 70, Kel. Setu,
Kec Cipayung, Jakarta Timur, 13880 

021-84997969/ 84998429 Fax: 021-84999360 

<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/> 

bbp3kp 

bbp3kp 

BBP3KP JAKARTA 